

## PERANAN IMOIRI PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN II TAHUN 1948-1949

Oleh: Dwi Jayanti Handayani, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta  
[anihandayani69@gmail.com](mailto:anihandayani69@gmail.com)

### ABSTRAK

Pada tahun 1948 Belanda menyerang ibukota yang menyebabkan pusat pemerintahan RI berpindah ke wilayah Yogyakarta. Diikuti serangan Belanda ke Yogyakarta, menyebabkan masyarakat dan TNI mengungsi ke Jogja Selatan tepatnya Imogiri. Tujuan penulisan ini memberikan gambaran pemerintahan Yogyakarta 1945 hingga menjelang Perang Kemerdekaan II, kondisi Bantul tahun 1948, dan mengungkap keterlibatan Imogiri saat Perang Kemerdekaan II. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis. Pertama, *heuristik* yaitu mencari sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data yang relevan. Kedua, *verifikasi* yaitu menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah. Ketiga, *interpretasi* ialah mencari hubungan keterkaitan antar fakta. Keempat, *historiografi* yaitu penyampaian tulisan dalam bentuk karya sejarah. Hasil penelitian menunjukkan kota Yogyakarta dibagi dalam daerah-daerah kemantren dan diberi otonom, karena serangan Belanda hal tersebut tidak berjalan lancar. Dalam menghindari serangan sebagian masyarakat dan TNI menuju Kabupaten Bantul. Di kabupaten Bantul dilaksanakan pembumihangusan tempat-tempat strategis setelah itu pemerintah militer Bantul dipindahkan ke Imogiri tepatnya kelurahan Selopamioro yang menjadi markas tetap.

**Kata kunci:** Peranan, Imogiri, Perang Kemerdekaan II.

## THE ROLE OF IMOIRI DURING THE WAR OF INDEPENDENCE II IN 1948-1949

### ABSTRACT

*In 1948 the Dutch attacked the capital which caused the central government of Indonesia to move to the region of Yogyakarta. Followed by the Dutch attack to Yogyakarta, causing the people and the TNI to flee to South Jogja Imogiri precisely. The purpose of this paper provides an overview of the government of Yogyakarta 1945 until the War of Independence II, Bantul condition of 1948, and reveal the involvement of Imogiri during the Second Independence War. Writing this thesis using critical historical method. First, the heuristics of looking for historical sources to obtain relevant data. Second, verification is to determine the authenticity and credibility of historical sources. Third, the interpretation is to look for relationships between facts. Fourth, historiography is the delivery of writing in the form of historical works. The results show that the city of Yogyakarta is divided into areas of kemantren and autonomous, because the Dutch attack is not going well. In avoiding the attack of some people and TNI to Bantul regency. In the district of Bantul carried out the scorching of strategic places after that the military government of Bantul was transferred to Imogiri precisely Selopamioro village which became the permanent headquarters*

**Keywords:** Role, Imogiri, War of Independence II.

### PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sudah berhasil dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 banyak mengalami tantangan dan hambatan. Jalannya roda pemerintahan pada masa awal revolusi masih dikuasai oleh bala tentara pendudukan Jepang. Dalam pemerintahan daerah yang baru dibentuk, hambatan yang dihadapi bukan hanya sikap dan tindakan dari penguasa Jepang melainkan juga faktor alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan masih sangat terbatas

bahkan sangat kurang, lebih-lebih alat perlengkapan yang berupa senjata.<sup>1</sup> Sementara itu di daerah Yogyakarta walaupun para penguasa dan serdadu-serdadu Jepang makin meningkatkan penjagaan, para pemuda serta para pembesar tetap mengadakan gerakan perebutan kekuasaan dan senjata. Perebutan kekuasaan itu secara de jure telah dimulai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII melalui amanat yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945. Organisasi-organisasi yang mempunyai peranan sangat besar dalam gerakan perebutan kantor-kantor sipil, gedung-gedung resmi, perusahaan-perusahaan, dan pabrik-pabrik diantaranya adalah KNI, Polisi, BKR dan para pemuda.<sup>2</sup> Pada akhirnya Jepang menyerah pada bulan Oktober 1945. Diakhiri dengan pertempuran Kota Baru dan pelucutan senjata Jepang, Yogya secara mutlak telah berada dalam kekuasaan RI.

Setelah kekuasaan Jepang dapat dipindahkan ke tangan bangsa Indonesia tentara sekutu datang dengan membawa pasukan Belanda. Kemerdekaan rakyat Indonesia belum sepenuhnya merasakan kebebasan baik berbangsa dan bernegara. Pada bulan Oktober, November, dan Desember 1945, kota Jakarta menjadi ajang kekerasan. Sementara itu Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui. Pemerintah Republik Indonesia yang telah lengkap dengan aparatnya supaya diganti dengan suatu pemerintahan yang dikepalai oleh gubernur jenderal dibantu oleh orang-orang Indonesia sebagai menteri oleh suatu Parlemen Indonesia. Pihak Indonesia dalam manifes politik yang dikeluarkan pada bulan November 1945, sanggup mengadakan kerjasama dengan Belanda dalam segala bidang, serta akan memberikan prioritas pada bangsa Belanda mengenai hak-hak modal asing akan diakui, dengan syarat bahwa Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi kedua belah pihak saling mempertahankan prinsip serta konsepsi masing-masing, maka perselisihan tidak dapat dihindari. Dalam keadaan demikian Jakarta dirasakan semakin gawat, sehingga wilayah Yogyakarta pada akhirnya menjadi tempat pertahanan paling aman untuk mengalihkan Ibukota dari Jakarta.<sup>3</sup>

Kemudian perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan dengan bantuan Komisi Tiga Negara (KTN). Perundingan ini diadakan diatas Kapal Perang Amerika Serikat USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang berlabuh di teluk Jakarta. Dalam perundingan ini Belanda bermaksud memaksakan kehendaknya mengenai bentuk ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam kehendak Belanda menyatakan kesanggupannya memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sesudah berlangsungnya zaman peralihan. Dalam zaman peralihan tersebut kedaulatan Indonesia tetap berada di tangan Belanda dan siap untuk mendirikan organisasi ketatanegaraan baru dengan negara-negara boneka di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Tashadi, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 73-74.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

<sup>3</sup> Tashadi, dkk, *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), hlm. 19-20.

Tetapi pihak Indonesia menolak konsepsi serta langkah Belanda yang merugikan pihak Indonesia tersebut. Seperti perundingan sebelumnya bahwa perundingan antara dua pemerintahan ini tidak membawa hasil. Perundingan ini mengalami kegagalan puncaknya pada tanggal 17 Desember 1948 dengan ultimatum pihak Belanda yang diberikan kepada Republik Indonesia melalui KTN, namun pihak Republik Indonesia tidak mampu untuk memenuhi hal tersebut karena terlalu singkat waktu yang diberikan oleh pihak Belanda.<sup>4</sup> Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya Agresi Militer Belanda II.

Sebelum Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, jumlah penduduk Yogyakarta kurang lebih 800.000 orang. Setelah Belanda mulai menduduki wilayah Yogyakarta jumlah penduduk tersebut makin lama makin menurun, di antara mereka yang meninggalkan Yogyakarta mereka memilih daerah pengungsian yang dirasa aman. Salah satu daerah yang berperan penting sebagai tempat pengungsian dan pertahanan saat terjadinya Perang Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta. Jarak dari kota Yogyakarta sampai kota Bantul kurang lebih 10 km.

Dalam pemerintahan militer Bantul tiap-tiap daerah dibentuk instansi agar tercipta kerjasama yang baik dalam menghadapi Belanda, misalnya di Kapanewon ada Kapanewon dan Komando Onder Distrik Militer (KODM). Kapanewon merupakan pemerintahan sipil yang melaksanakan pemerintahan yang tertib dalam keadaan damai maupun keadaan perang. Sementara KODM adalah suatu instansi militer yang melakukan tugasnya pada waktu perang. KODM ini berfungsi sebagai alat perjuangan dalam kemiliteran. Sebelum Belanda memasuki kota Bantul, seluruh bangunan penting di kota Bantul dibumihanguskan agar tidak digunakan sebagai pos-pos Belanda. Sebelum terjadi penyerangan oleh pihak Belanda pemerintahan Bantul dipindahkan ke Kecamatan Imogiri tepatnya kelurahan Selopamioro karena letak geografis yang strategis.

Menarik untuk diketahui bahwa ketika Belanda Menyerang Bantul pemerintahan militer Bantul berpindah ke Imogiri. Tidak hanya pemerintahan militer, Imogiri juga dibanjiri para pasukan militer, orang-orang sipil serta masyarakat yang berasal dari Yogyakarta. Hal tersebut didukung penuh oleh warga sekitar. Dukungan masyarakat bisa berwujud tempat tinggal, makanan, keamanan dan komunikasi serta informasi.

## **PEMERINTAHAN YOGYAKARTA DARI REORGANISASI TAHUN 1945 SAMPAI MENJELANG PERANG KEMERDEKAAN II**

---

<sup>4</sup> Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Periode Renville*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 139.

Pada akhir zaman pendudukan Jepang yakni April 1945, di Kasultanan Yogyakarta diadakan reorganisasi untuk lebih memperkecil peranan Papatih Dalem maka dalam reorganisasi tersebut Sri Sultan membagi Pemerintahan Kasultanan dalam jawatan-jawatan. Jawatan-jawatan ini disebut Paniradya yang masing-masing dipimpin oleh Paniradyapati. Paniradya yang dibentuk oleh Sri Sultan pada bulan April 1945 ada 5<sup>5</sup> yaitu: Paniradyapati Kapanitran, Paniradya ayahan umum, Paniradya Wiyatapraja (Jawatan Pendidikan), Paniradya Ekonomi, dan Paniradya Yayasan Umum (Jawatan Pekerjaan Umum).<sup>6</sup> Tugas masing-masing Paniradya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal Yogyakarta Koorei angka 1 tentang perubahan aturan dan susunan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Dengan terbentuknya Paniradya-paniradya itu maka segala urusan pemerintahan yang semula dipegang oleh Papatih Dalem terbagi ke dalam Paniradya-paniradya tersebut sehingga Papatih Dalem sudah tidak memegang kekuasaan sedikitpun akhirnya jabatan tersebut dihapuskan. Dengan dihapusannya jabatan Papatih Dalem itu, segala wewenang dan kekuasaan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta yang semula dipegang oleh Papatih Dalem diambil alih oleh Sri Sultan. Beliau kemudian memimpin langsung para Paniradyapati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kasultanan.<sup>7</sup> Dengan reorganisasi tersebut juga dihapuskan kawedanan-kawedanan di Kabupaten Kota Yogyakarta. Setelah dihapusnya Kawedanan-kawedanan tersebut maka Kabupaten kota langsung dibagi dalam daerah-daerah Kemantren yang masing-masing dikepalai oleh Mantri Pangreh Praja. Perubahan yang dilakukan tersebut dilanjutkan di Kabupaten, Kapanewon, dan desa dengan dikeluarkannya Yogyakarta *Koorei* no 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasultanan Yogyakarta.

Setelah proklamasi dibentuk komite nasional di seluruh Indonesia. Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) diikuti dengan pembentukan komite nasional di daerah-daerah. Salah satunya Yogyakarta. KND Yogyakarta mempunyai tugas untuk membantu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pada fase berikutnya KND Yogyakarta mengadakan musyawarah dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualam VIII tentang penyatuan kasultanan dan pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September dan pada prakteknya Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman telah dipersatukan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Yogyakarta terbentuk sesuai dengan isi pasal 18 UUD 1945 dilegalisasi oleh UUD no 3 Tahun 1950 yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Pokok RI tahun 1948. Setelah diresmikannya Yogyakarta dibuatlah

---

<sup>5</sup> Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 195-199.

<sup>6</sup> Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan*

*Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 131-132.

<sup>7</sup> Sujamto, *op.cit.*, hlm. 200.

perubahan-perubahan mendasar berdasarkan maklumat no 18 tahun 1946 yang salah satu isinya adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan didaerahnya masing-masing. Dengan dibentuknya DPRD dalam semua tingkat pemerintahan (kecuali tingkat Kapanewon) maka Komite

Nasional di Yogyakarta dihapuskan. Sehubungan dengan keadaan wilayah Indonesia yang darurat, khususnya didaerah ibukota Jakarta, menyebabkan pemerintahan Republik Indonesia (RI) mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota RI ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Maka kemudian pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden beserta Wakilnya pindah ke Yogyakarta. Dengan hal itu maka kota Yogyakarta diberi otonom dan bertanggungjawab kepada pemerintahan pusat, namun hal tersebut tidak berjalan lancar karena kondisi pemerintahan yang masih baru dan dengan adanya serangan dari Belanda.

## **BANTUL PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN II**

Menghadapi penyerbuan tentara Belanda pemerintah kabupaten Bantul dinyatakan menjadi Pemerintah Darurat Sipil, maka dibentuk pemerintahan militer. Pemerintahan Militer Kabupaten Bantul terdiri dari wakil-wakil pemerintah sipil militer dan organisasi kelaskaran pemuda. Kepala Pemerintahan Militer Bapak bupati KRT Tirtodiningrat, bapak bupati Anom KRT Labaningrat menjadi sekretaris. Kapten Rame menjadi pendiri KDM kemudian diserahkan kepada Mayor Hadidjojo, bagian kelaskaran dan pemuda adalah Bapak S. Dharjono.<sup>8</sup> Selain itu diadakan pembumihangusan tempat-tempat strategis agar tidak dijadikan pos-pos Belanda. Sebelum pembumihangusan bangunan-bangunan tersebut semua panewu wilayah Bantul memindahkan kantornya dirumah penduduk yang dipandang aman dan gedung segera dibumihanguskan. Pelaksanaan bumihangus berjalan lancar mendapat sambutan dan bantuan masyarakat turut aktif membongkar dan membakar gedung dan bangunan yang dipandang vital antara lain gedung kantor kapanewon, kantor pos, gudang garam, sekolahan, pegadaian dan jembatan termasuk kantor dalem kabupaten dan sebagainya.<sup>9</sup>

Ketika Dewan pimpinan pemerintah militer kabupaten memilih untuk meninggalkan kota Bantul mereka memilih membentuk dan memindahkan pemerintahan di Imogiri yang berada di daerah perbukitan untuk sementara waktu. Alasan dipilihnya daerah Imogiri karena tempatnya yang sangat strategis dan medan yang dilalui untuk mencapai tempat ini cukup sulit bagi Belanda. Pemindahan pemerintahan militer Kabupaten Bantul ini berada di Kelurahan Selopamioro tepatnya di pedukuhan Siluk. Kepindahan pemerintahan militer tersebut diikuti dengan para pejabat-pejabat lainnya.<sup>10</sup> Kemudian

---

<sup>8</sup> Madusari Pramusito dan Syarif Dhardjono, *Perjuangan di Kabupaten Bantul Yogyakarta 1942-1986*, (Bantul, 2012), hlm. 74-75.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>10</sup> *Gerilya Wehkreise III*, (Yogyakarta: PERC.KLG,TT), hlm 85.

di wilayah ini disusunlah Pemerintahan Militer Bantul, Kmd Letnan Kolonel Latif menjadi Kepala Daerah, Bupati menjadi Bupati Militer yaitu Tirtodiningrat dan sekretaris yaitu Kanjeng Labaningrat, Kmd K.D.M menjadi Wedana Militer yaitu Mayor Hadijojo, Kmd O.D.M menjadi Panewu Militer. Adapun Kesatuan Militer yang terorganisasi yang beroperasi di wilayah Bantul adalah Batalyon Mayor Sardjono dengan nama SWK 102 dengan 4 kompi yang dipimpin oleh Kapten Widodo, Kapten

Ali Effendi, Kapten Soemarmo dan Kapten Soedarmo.<sup>11</sup> SWK 102 Bantul bermarkas di Pandak. Kompi 1 dipimpin oleh Kapten Widodo berada di Krapyak, Dongkelan. Kompi 2 dipimpin oleh Kapten Soedarmo berada di Bakulan. Kompi 3 Kapten Ali Affandi berada di Kotagede dan Kompi 4 Kapten Soemarmo semula berada di Tamanan kemudian pindah ke Bibis, Bangunjiwo. Sebelah barat Padokan kompi senjata bantuan semacam baterai, artileri dipimpin oleh Kapten Oesodo.<sup>12</sup>

Pada tanggal 19 Januari 1949 Belanda memasuki Bantul. Jalur yang dilalui oleh Belanda ini dibagi menjadi 2 rute. Pertama rute timur Pleret-Payaman-Pajimatan dan jalur kedua rute barat melalui Barongan-Padokan-Pajangan. Pasukan-pasukan Belanda ini dalam perjalannya menuju ke kota Bantul dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk menuju ke kota Belanda menggunakan kendaraan bermotor yaitu truck, tractor, brancarier, dan tank. Kedatangan pasukan Belanda ini disambut gembira oleh para gerilyawan dengan perlawanan yang gigih dan pantang menyerah. Hampir setengah hari para gerilyawan dapat menahan gerakan pasukan Belanda. Akan tetapi karena Pasukan Belanda bersenjata lengkap, akhirnya para gerilyawan terpaksa menyingkir. Belanda terus bergerak menuju ke kota Bantul. Kelompok pasukan Belanda yang melewati jalur timur dan barat bertemu di tengah-tengah kota. Tidak berapa lama kemudian kota Bantul berhasil diduduki. Di wilayah Bantul Belanda membentuk pos-pos antara lain di kota Bantul, Padokan, dan Pleret. Dari pos-pos ini selalu digunakan untuk patroli. Situasi semacam ini dimanfaatkan betul oleh para gerilyawan untuk mengadakan penghadangan dan penyerangan terhadap pos Belanda tersebut. Para Gerilyawan tidak hanya melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang sedang berpatroli saja tetapi juga melakukan penyerangan terhadap pos atau daerah Belanda yang ada di Bantul. Ini dilakukan untuk menjatuhkan moril pasukan Belanda, juga membuktikan bahwa TNI dan untuk mengisolir pasukan Belanda dari induk pasukannya yang berada di kota Yogyakarta. Pasukan Belanda yang berada di Bantul tidak aman hal ini disebabkan setiap kali pasukan Belanda mengadakan patroli diserang oleh pasukan gerilya. Mengingat daerah SWK 102 (Bantul) cukup luas maka dalam menyampaikan perintah penyerangan dengan bantuan kurir yang telah dikirim terlebih dahulu. Dengan melalui kurir tidak begitu sukar mencari pemimpin yang berada di tiap-tiap penjuru wilayah SWK 102. Kurir atau caraka pada masa revolusi mempunyai peranan yang sangat

---

<sup>11</sup> Madusari Pramusito dan Syarif Dhardjono, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>12</sup> Djoko Suryo, *Ketika Rakyat Bantul Membela Republik*, (Bantul: Yayasan Projo Tamansari, 2008), hlm 26-29.

penting karena bertugas sebagai penghubung untuk menyampaikan surat atau berita. Pada saat itu satu-satunya penghubung adalah kurir dengan jalan kaki. Hubungan dengan pasukan yang tersebar di seluruh daerah Bantul dengan kurir.<sup>13</sup>

Pertempuran bertambah hari semakin sengit. Belanda terus menyebar mata-mata. Selanjutnya serangan gangguan dan pengacauan dapat ditingkatkan menjadi serangan rutin. Serangan ditingkatkan

lagi menjadi serangan umum atas perintah Komandan WK III Letkol Suharto. Dalam masa-masa ini, hubungan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan pemimpin gerilya tidak pernah putus. Untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat, para pejuang waktu itu menggunakan media selebaran, pamflet dan tulisan-tulisan yang membakar semangat. Bahkan para pejuang dengan sadar menggunakan media surat kabar sebagai penyebar berita dan informasi lainnya. Surat kabar tersebut bernama Gerakan Dalam Kota yang disingkat Gerdak. Surat kabar tersebut diterbitkan oleh Komandan Sektor C-1 SWK 101 Sumiharjo.<sup>14</sup> Pasukan SWK 102 yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bantul selama masa revolusi mempunyai peranan yang cukup besar dalam mempertahankan kemerdekaan terutama di daerah Kabupaten Bantul. Titik-titik pertempuran tersebut yaitu Nyangkring, Madukismo, Tirtonirmolo, Trirenggo, Wonokromo, Ngoto, Tangsi Polisi Bantul, Jebugan, Pandak, Piyungan, Jati, dan Brajan.

Pada tanggal 17 Maret 1949 pasukan gerilya melakukan serangan secara serentak ke pos atau markas Belanda yang ada di kota Bantul, Padokan maupun Barongan, Pleret. Serangan ini dilakukan oleh semua pasukan yang berada di bawah SWK 102. Ternyata serangan ini berhasil baik bahkan Belanda terpaksa lari meninggalkan markasnya di Barongan. Namun demikian berkat kesadaran seluruh lapisan masyarakat Bantul bersama dengan TNI dan laskar perjuangan akhirnya Belanda terpaksa meninggalkan wilayah Bantul pada tanggal 26 Juni 1949.<sup>15</sup> Setelah tentara Belanda meninggalkan kota Bantul pemerintahan militer kembali ke pusat kota Bantul.

## **KETERLIBATAN IMOGIRI DALAM PERANG KEMERDEKAAN II**

Imogiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul. Imogiri berdiri tahun 1928, Imogiri berasal dari dua kata dari bahasa jawa kuno yaitu Ima dan Giri, Ima berarti Kabut, Giri berarti gunung. Secara utuh Imogiri berarti gunung yang berkabut, karena Imogiri terletak di kaki bukit (lembah). Diapit dari dua aliran sungai disebelah barat dan timur, yaitu sungai Opak dan sungai Celeng.<sup>16</sup> Kecamatan Imogiri berada di sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Juariyah pada tanggal 3 Maret 2017 di Yogyakarta.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 44-51

<sup>15</sup> Suhatno, *op.cit.*, hlm. 67-70.

<sup>16</sup> Di akses dari, <http://Imogiri-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/57>. Pada tanggal, 30 April 2017, pukul 22.05.

mempunyai luas wilayah 5.448 Ha. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak antara pusat pemerintahan (Kabupaten Bantul) adalah 8 km. Bentangan wilayah Kecamatan Imogiri berupa 30% daerah dataran sampai berombak dan 70% bergunung. Wilayah kecamatan Imogiri berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Pleret di Sebelah Utara, Kecamatan Dlingo di sebelah Timur, Kabupaten Gunungkidul sebelah Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pleret. Wilayah administratif di Kecamatan Imogiri terdiri dari Kelurahan Selopamiro, Kelurahan Sriharjo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Imogiri, Kelurahan Karangtalun, Kelurahan

Karantengah, Kelurahan Wukirsari dan Kelurahan Girirejo. Sebagian besar penduduk Kecamatan Imogiri adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 13.431 orang atau 23,83% penduduk Kecamatan Imogiri bekerja di sektor pertanian.<sup>17</sup>

Wilayah di Kelurahan Girirejo yang termasuk dalam kecamatan Imogiri menjadi tempat pengungsian sekaligus pertahanan saat itu ialah Pajimatan dan Payaman. Pemilihan daerah tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan oleh pasukan TNI. Struktur tanah yang hampir mendekati tanah pegunungan kapur dengan berbagai lembah di dalamnya memberikan perlindungan tersendiri terhadap kemungkinan pengintaian oleh pihak lawan melalui darat maupun udara. Dalam situasi seperti itu dapat untuk membebaskan diri dari jangkauan operasi militer atau dapat menahan kelancaran laju operasi militer Belanda dan perseimbangan persenjataan menjadi kurang menonjol pengaruhnya. Hal tersebut juga didukung oleh saluran komunikasi darat yang sulit baik oleh karena struktur geografis daerah pinggiran pegunungan seribu maupun ketiadaan fasilitas transportasi yang memadai. Dengan demikian transportasi menuju Pajimatan menimbulkan kesulitan yang luar biasa, terutama untuk daerah-daerah pelosok disekitarnya bagi strategi militer Belanda dan merupakan suatu yang sangat biasa bagi mobilitas pasukan militer Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gerilyawan yang telah membangun markas pertahanan di wilayah tersebut seperti misalnya pasukan Widodo, pasukan Sarjono dan lain-lain.<sup>18</sup> Sebagian besar pengungsi dan pasukan gerilya memilih tempat tujuan disekitar makam raja-raja mataram yang terletak di bukit Merak dan bukit Pengger. Makam raja-raja mataram dipercaya dengan berkah para arwah leluhurnya, sehingga untuk mencari keselamatan mereka menuju ke tempat yang dianggap membawa berkah tersebut. Sedangkan untuk sie yang mengurus bagian logistik bermarkas di rumah Darmo Sukarto, lurah Girirejo. Selain itu Girirejo tidak hanya merupakan kantong gerilya dari angkatan darat melainkan juga terdapat sepasukan AURI dan sepasukan angkatan kepolisian yang bermarkas di Payaman. Dengan begitu dalam waktu singkat daerah sekitar makam seperti Pajimatan dan Payaman dipenuhi pejuang berbaur dengan pengungsi.<sup>19</sup> Ternyata perkiraan TNI melesat tentang strategi Belanda

---

<sup>17</sup> Di akses dari, <http://geografisimogiri.pdf.co.id>. Tanggal 30 April 2017

<sup>18</sup> Dharmo Hardjowidjono (ed), *op.cit.*, hlm. 186.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 213-215.

untuk mencapai wilayah tersebut. Tetapi sehari sebelum Belanda menyerang hal ini diketahui oleh intel gerilya bernama Dulrohim dan memberitahukan kepada pimpinan pasukan gerilya, sehingga sebagian pasukan gerilya menyingkir dari tempat tersebut. Belanda menyerang Kelurahan Girirejo pada tanggal 19 Januari 1949, serangan Belanda tersebut membawa korban antara lain Subardo (anggota TNI gerilya), Tarmuji (anggota TNI gerilya), Joyo Supeno dan Dulidi (penduduk Girirejo), Atmo Pawiro beserta istri, dan Sumo Pawiro (ketiganya pengungsi dari kota). Salah satu yang mereka tuju untuk menghindari serangan Belanda ialah Kelurahan Selopamioro.

Pada saat situasi dikota Yogyakarta sedang kacau akibat dari serangan Belanda tepatnya tahun 1948 para pasukan TNI dan berbagai masyarakat Yogyakarta maupun luar kota Yogyakarta meninggalkan daerah asal mereka, sebagian memilih mengungsi ke wilayah Jogja Selatan. Secara geografis wilayah Jogja bagian Selatan berdekatan dengan gunung kidul disamping itu medan lokasi dataran tinggi, bisa melihat secara visual situasi Jogja secara umum. Sehingga dapat lebih leluasa memantau keadaan Jogja saat itu.<sup>20</sup> Salah satu wilayah yang mereka tuju untuk menghindari serangan Belanda ialah Kelurahan Selopamioro. Secara geografis Kelurahan Selopamioro dibatasi Sungai Oyo di sebelah utara, di sebelah selatan dibatasi Kelurahan Giritirto dan Giripurwo, sebelah barat dibatasi Kelurahan Seloharjo dan di sebelah timur dibatasi oleh Kelurahan Banuseco. Kelurahan ini bukan merupakan suatu lokasi pertempuran.<sup>21</sup> Kelurahan Selopamioro digunakan sebagai tempat pengungsian orang sipil, dipakai sebagai tempat pengaturan strategi pertempuran oleh pasukan TNI, dan digunakan pula sebagai markas. Untuk mencapai wilayah ini para pengungsi dan pasukan TNI harus menyebrangi sungai Oyo terlebih dahulu dengan menggunakan gethek-gethek, karena jembatan yang ada telah dibumihanguskan. Gethek-gethek tersebut sengaja disembunyikan oleh penduduk supaya tidak digunakan oleh Belanda. Pada masa aman gethek-gethek tersebut digunakan sebagai alat transportasi penduduk yang akan pergi ke kota atau desa-desa yang bersebrangan dengan sungai Oyo tersebut. Pengungsi-pengungsi dari kota tersebut membawa barang-barang yang sempat mereka bawa dan bekal untuk sementara waktu. Mereka juga mendapat jamuan dari penduduk setempat. Kemudian terjalin hubungan timbal balik antara penduduk dan pengungsi. Berhubung pengungsi dari kota tidak diketahui oleh Pamong Desa berapa lama mereka akan berada di wilayahnya maka pamong desa menentukan langkah dan mengambil suatu kebijakan agar tidak memberatkan penduduk. Lurah dan Kepala Dukuh segera mengeluarkan kas desa untuk disumbangkan kepada setiap rumah yang dipergunakan para pengungsi sebagai tempat tinggal sementara, disamping juga mengumpulkan bahan-bahan makanan dari penduduk. Gambaran kekuatan bersenjata dari pasukan gerilya yang berada didaerah itu berdasarkan para informan menyebutkan antara lain 300 personel

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Suhardi pada tanggal 19 April 2017 di Siluk.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tomejo pada tanggal 18 April 2017 di Payaman

Angkatan Darat dari Resimen 22 Brigade XX dibawah pimpinan Sunarto dan Moyoretno, Angkatan Udara di bawah pimpinan Basuki, pemerintah militer Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kolonel Latif, sejumlah anak buah Komarudin dari kesatuan Polisi Pamong Praja berada di Padukuhan Siluk<sup>22</sup> dan Intel Kolonel Zulkifli Lubis yang berada di Padukuhan Srunggo. Kedatangan tentara Republik Indonesia disambut baik oleh warga masyarakat di Kelurahan Selopamioro. Pada umumnya tempat yang dipersiapkan warga untuk anggota pasukan beralas tikar dilantai di pojok-pojok serambi. Tempat tersebut disesuaikan dengan keamanan, karena bisa mengamati sekeliling serta mudah untuk bergerak secepatnya

meninggalkan rumah bila keadaan tidak memungkinkan. Selain dari para militer dan masyarakat luar, diantara pengungsi-pengungsi ini juga terdapat orang sipil yaitu pegawai-pegawai Radio Republik Indonesia (RRI) beserta Sukamto sebagai pemimpinnya, serta Saleh bagian listrik dan teknik.<sup>23</sup>

Dalam hal keamanan pasukan TNI ini membangun markas-markas yang digunakan untuk penjagaan. Markas-markas TNI ini menyebar di beberapa pedukuhan di Kelurahan Selopamioro antara lain padukuhan Siluk, Srunggo, Lanteng, dan Kalidadap. Untuk menjaga ketertiban dan pemantauan akan pasukan Belanda, para TNI mengadakan jadwal piket pada setiap pos terdekat di tempat mereka mengungsi. Alat komunikasi antar pos-pos penjagaan menggunakan radio putar.<sup>24</sup> Dengan meletusnya Perang Kemerdekaan II, maka para TNI segera memberlakukan rencana yang sudah mereka susun sebelumnya. Sistem perlawanan gerilya yang bersifat totaliter dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat dilaksanakan guna menghadapi agresi Belanda. KODM adalah Kepala Pemerintah Militer Kecamatan. Untuk pelaksanaan Pemerintah Militer, KODM mempunyai pasukan gerilya desa atau pager desa. Pager Desa dibentuk berdasarkan Instruksi dari Markas Besar Komando Jawa (MBKD) Nomer 11/MBD/49, Tanggal 25 Januari 1949. Menetapkan Instruksi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa). Khusus untuk pemerintahan militer di Kecamatan Imogiri telah terbentuk 40 anggota pager desa. Kepala regu pager desa, secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintahan Militer Kecamatan yang pada saat itu dijabat oleh Rujiman. Pager desa yang dibentuk anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda yang terpilih, diambil dari tenaga-tenaga bekas tentara yang berpengalaman atau diutamakan mempunyai pengalaman dalam ilmu kemiliteran misalnya dapat baris berbaris, mampu dalam menggunakan senjata, mampu bekerjasama secara kelompok dan belum menikah. Persenjataannya hanyalah senjata tajam dan senjata yang diusahakan oleh KODM. Setelah dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah Militer tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh Kepala Desa, anggota Pager Desa diberi pembekalan di kecamatan tentang fungsi dan tugas yang akan dilakukan. Tugas pager desa ialah diperbantukan bersama TNI seperti melakukan pembumihangusan jembatan-jembatan yang dapat dilalui oleh Belanda, membumihanguskan

---

<sup>22</sup> Suhatno, *op.cit.*, hlm. 149.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dwijoedisiswoyo pada tanggal 19 April 2017 di Kalidadap.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Suhardi pada tanggal 19 April 2017 di Siluk.

bangunan-bangunan strategis yang dapat dijadikan markas, dan memasang trekbom yang bertujuan untuk merusak kendaraan Belanda. Selain itu pada masa Perang Kemerdekaan II pager desa ini berfungsi sebagai kurir untuk menghubungkan antara gerilya dan pemerintah desa.<sup>25</sup> Dengan demikian peran pager desa sebagai pembantu dari kepala pemerintahan militer sangat menentukan.

Kontribusi yang diberikan oleh warga sekitar juga tidak kalah pentingnya sebagai bentuk dari dukungan perjuangan lewat dapur umum.<sup>26</sup> Dalam penyediaan makanan untuk para pasukan TNI dan orang-orang Sipil, tiap-tiap padukuhan menyediakan satu dapur umum agar lebih mudah dalam hal pengkoordinasian maupun pendistribusian makanan tersebut. Sedangkan dapur umum untuk masyarakat luar yang mengungsi telah disediakan beberapa dapur umum dalam satu pedukuhan. Makanan pokok pada saat itu antara lain beras, jagung, dan ketela. Warga Kelurahan Selopamioro juga memberikan kontribusi berupa tempat tinggal, dan makanan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kepalangmerahan yang didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Peranan anggota PMI yang sebagian besar kaum wanita di dalam kepalangmerahan adalah pelayanan pengobatan, perawatan dan pengurusan terhadap anggota pasukan yang gugur terutama mereka yang diketahui identitasnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, di Kasultanan Yogyakarta diadakan reorganisasi untuk lebih memperkecil peranan Papatih Dalem, dalam reorganisasi tersebut Sri Sultan membagi Pemerintahan Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang disebut paniradya dan dipimpin oleh paniradyapati. Kemudian dihapuskan kawedanan-kawedanan di kabupaten kota Yogyakarta dan dibagi dalam daerah-daerah kemandren yang masing-masing dikepalai oleh Mantri Pangreh Praja. Perubahan yang dilakukan tersebut dilanjutkan di Kabupaten, Kapanewon, dan desa. Setelah proklamasi dibentuk Komite Nasional di Yogyakarta yang memusyawarahkan penyatuan daerah Kasultanan dan Pakualaman bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Setelah kedua daerah tersebut menjadi satu, dibubarkanlah Komite Nasional dan dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan selanjutnya. Saat terjadi kekacauan di Jakarta pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Dengan kepindahan pemerintahan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh politik, pegawai negeri, sehingga Yogyakarta menjadi penuh dan dengan keadaan seperti itu berpengaruh pada administrasi pemerintahan maka pemerintah Republik Indonesia menyatakan pembentukan Haminte Kota Yogyakarta dengan status otonom dan bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Pusat. Kondisi pemerintahan yang masih baru membuat

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Wadi Setiawan pada tanggal 20 April 2017 di Srunggo.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Wadi Setiawan pada tanggal 20 April 2017 di Srunggo.

Haminte kota Yogyakarta tidak dapat berjalan dengan lancar. Pada waktu yang sama Belanda menyerang Yogyakarta dengan hal tersebut Haminte Yogyakarta tidak dapat menjalankan fungsinya.

Penyerangan Belanda atas Yogyakarta mengakibatkan masyarakat Yogyakarta dan pasukan TNI meninggalkan daerah asalnya, salah satu daerah yang dituju adalah Jogja Selatan tepatnya kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul TNI bersama pasukannya dan pemerintah kabupaten menyusun suatu perlawanan gerilya dengan membentuk suatu pemerintahan militer. Tujuan dibentuknya pemerintahan militer agar ada suatu pemerintahan yang tegas untuk membantu para militer menghadapi Belanda. Susunan Pemerintahan Militer Kabupaten Bantul ialah bupati KRT Tirtodiningrat sebagai Kepala Pemerintahan Militer, bupati Anom KRT Labaningrat sebagai sekretaris. Kapten Rame menjadi pendiri sekaligus komandan KDM Bantul dan bagian kelaskaran dan pemuda adalah S. Dharjono. Adapun kesatuan militer yang terorganisir di Kabupaten Bantul antara lain Batalyon Mayor Sardjono dengan

nama SWK 102 dengan 4 kompi yang dipimpin oleh Kapten Widodo, Kapten Ali Effendi, Kapten Soemarmo dan Kapten Soedarmo. SWK 102 Bantul bermarkas di Pandak. Selain itu ada kesatuan Polisi Pelajar pertempuran yang bermarkas di Banyakan di bawah pimpinan Djohan Soeparno.

Pada tanggal 24 Desember 1948 atas keputusan dari para anggota dewan militer diadakan pembumihangusan di daerah Kabupaten Bantul agar tidak diduduki oleh tentara Belanda. Pembumihangusan dimulai dari pabrik gula Gesikan berikutnya baru semua bangunan, gedung-gedung milik pemerintah, jembatan dan bangunan-bangunan vital yang strategis. Setelah pembumihangusan selesai Dewan pimpinan pemerintah militer kabupaten memilih untuk meninggalkan kota Bantul mereka membentuk dan memindahkan pemerintahan di Imogiri tepatnya kelurahan Selopamioro yang berada di daerah perbukitan untuk sementara waktu. Tidak hanya pemerintahan militer kabupaten Bantul yang berada di tempat ini tetapi ada pasukan TNI dan masyarakat yang berasal dari kota Yogyakarta. Ketika wilayah tersebut menjadi pengungsian dan markas TNI warga desa mulai memberikan kontribusi mereka, selain pembagian tempat-tempat yang digunakan sebagai penginapan juga diadakan dapur umum. Selain kontribusi tersebut pelayanan kesehatan hingga peran serta digaris belakang sebagai Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) diberikan dalam mendukung perjuangan. Kemampuan yang belum memadai menjadikan peranan pager desa bukan sebagai pejuang yang turut serta dalam penyerangan terhadap Belanda tetapi berada digaris belakang. Bentuk peranan-peranan tersebut antara lain menjaga pos-pos keamanan, melakukan pengintaian untuk mengantisipasi adanya gerakan Belanda bersama pasukan TNI, dan sebagai penyampai berita antara pasukan TNI dengan pemerintah desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Periode Renville*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Djoko Suryo, *Ketika Rakyat Bantul Membela Republik*, Bantul: Yayasan Projotamansari, 2008.

Gerilya Wehkreise III, Yogyakarta: PERC.KLG,TT

Madusari Pramusito dan Syarif Dhardjono, *Perjuangan di Kabupaten Bantul Yogyakarta 1942-1986*

Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Tashadi, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986

-----, dkk, *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.

### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Jabatan		Asal
			Dulu	Sekarang	
1	Dwijoedisiswoyo	86	Pamong Desa	pensiunan	Kalidadap
2	Wadi Setiawan	83	Pamong Desa	Pensiunan	Srunggo
3	Tomejo	86	Petani	Petani	Payaman Selatan
4	Suhardi	83	Pamong Desa	Pensiunan	Siluk

Yogyakarta, 30 November 2017

Pembimbing



Danar Widiyanta, M.Hum.  
NIP. 196811010 199403 1 001

Reviewer



Dina Dwikurniarini, M.Hum  
NIP. 19571209 1987022 001